

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Saat ini tidak menutup kemungkinan apabila sistem teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan kecepatan dalam penyampaian informasi, jangkauan lebih mudah, serta terjadinya transparansi, tidak terkecuali dalam sistem pemerintahan. Saat ini dalam otonomi daerah sangat perlu untuk menciptakan pemerintahan yang cerdas (smart government) dengan cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang biasa disebut dengan e-government atau electronic government. Pada smart government, pelayanan publik dilakukan secara terpusat, adapun sistem pelayanannya sudah terintegrasi. Oleh sebab itu smart government dapat menopang serta menjamin dalam mengakses layanan secara efektif.

Salah satu bentuk smart government adalah smart city yang diharapkan bisa menjadi penghubung antara tuntutan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang tepat, efektif dan efisien dari pemerintah kota, dengan memanfaatkan teknologi informatika (Rahmadanita et al., 2019). Pemerintahan yang cerdas (smart government) merupakan pengambilan kebijakan yang tepat bagi masyarakat dengan mengimplementasikannya berbasis IT sehingga lebih efektif dan efisien dengan syarat harus tepat sasaran untuk mewujudkan smart city (Irfan et al., 2018). Untuk menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan smart government saat ini telah dikembangkan konsep pemerintahan yang cepat, dan tanggap terhadap perubahan (agile government).

Agile government merupakan kemampuan pemerintah untuk dapat merespon segala perubahan tak terduga secara cepat, untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda (Holmqvist dan Pessi, 2006; Ngai et al., 2011; Bradley et al., 2012). Selain cepat, pemerintah juga harus tepat dalam mengatasi berbagai tuntutan dari masyarakat yang sewaktu-waktu berubah dan tidak terduga. Agile government dapat diartikan juga sebagai penerapan sistem manajemen yang lebih responsif dan lincah ke dalam manajemen pemerintahan melalui terciptanya struktur organisasi yang adaptif serta pemanfaatan IT, sertaantisipasi terhadap lingkungan disruptif di berbagai sektor. Teknologi menghasilkan inovasi disruptif, yang mengganggu keamanan. Disrupsi, yang disebut Rhenald Kasali bukan sekedar fenomena hari

ini (today), melainkan fenomena "hari esok" (the future) yang dibawa oleh para pembaharu ke saat ini, hari ini (the present), sehingga pemerintah tidak punya cukup waktu memikirkan kebijakan yang antisipatif (Handa Gustiawan, 2019). Saat ini, pemerintahan yang cepat menghadapi tuntutan dan keinginan masyarakat merupakan kebutuhan yang semakin penting terutama bagi penyedia layanan publik. Pemerintah yang agile adalah pemerintah yang dapat bertindak dengan cepat, dan mudah dalam beradaptasi dengan situasi serta kondisi yang terjadi. Menjadi pemerintahan yang agile tidak hanya penting bagi orang dan sumber daya manusia, namun kriteria lain juga amat diperlukan untuk dapat terwujudnya agile government. Kesuksesan dalam mengimplementasi agile governance sangat tergantung kepada kapasitas dan kapabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di suatu daerah maupun negara (Vernanda, 2020).

Pemerintah yang agile bersifat fleksibel dan adaptif dengan segala tuntutan perkembangan zaman dengan menerapkan enam karakteristik utama yang pertama adalah ideologi, strategi, struktur, proses, teknologi, dan yang terakhir adalah sumber daya manusia untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Untuk bisa mengelola Revolusi Industri 4.0 diperlukan model pemerintahan yang kreatif, adaptif, cepat, dan mumpuni dalam mengelola perubahan eksponensial yang dihasilkan oleh Revolusi Industri 4.0. Inilah yang disebut "agile government" (Handa Gustiawan, 2019). Smart government dalam model agile government juga sangatlah berperan penting dalam mengatasi masalah penanganan covid 19 di Indonesia.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka penambahan pasien positif covid 19 terbanyak pada urutan ke empat dengan jumlah kasus konfirmasi positif covid 19, dimana daerah dengan konfirmasi kasus positif terbanyak pertama di duduki oleh provinsi DKI Jakarta. Hampir seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Timur termasuk dalam zona yang tinggi atas kasus tinggi positif covid 19. Sebagian kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Timur, hanya 2 daerah yang angka penambahan positif covid 19 rendah. Beberapa daerah di provinsi Jawa Timur yang termasuk angka positif covidnya tinggi termasuk kedalam daerah yang sangat rawan. Hal ini didukung oleh penelitian pemodelan penyebaran Covid-19 secara real time dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber statistik yang hasil tracking datanya menunjukkan peningkatan tajam tentang penyebarannya (Etikasari et al., 2020).

Agile Government adalah pemerintahan yang cepat dan fleksibel dalam menghadapi segala perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat, serta mampu bergerak cepat untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah. Agile government diharapkan memiliki sistem yang lebih efisien dengan pemanfaatan teknologi informasi yang komprehensif dan lebih luas. Salah satunya adalah dalam mengatasi masalah persebaran covid 19, pemerintah harus cepat dalam merespons dan tepat dalam membuat kebijakan untuk menekan persebaran covid 19. Langkah-langkah pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 tersebut dilakukan dengan memadukan penggunaan kewenangan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, tindakan badan dan pejabat pemerintahan, serta dukungan birokrasi sebagai organ pelaksana kebijakan (Juliani, 2020).

Dalam penanganan persebaran covid 19 pemerintah daerah harus selalu berkoordinasi dengan pusat dan selaras dengan himbauan pusat. Jumlah kasus orang terinfeksi Corona terus mengalami peningkatan, diperkirakan kurvanya akan melandai pada akhir tahun 2020 (Tuwu, 2020). Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang masuk kedalam zona merah atau zona tinggi kasus terkonfirmasi positif covid 19. Hal tersebut bisa terjadi karena meningkatnya angka pasien positif covid 19 pada bulan Selasa 20 Juli 2021. Berdasarkan data yang diperoleh dari laman penanganan covid 19 Pemerintah Kabupaten Pacitan, ada penambahan pasien positif covid 19 sebanyak 67 pasien pada hari Selasa 20 Juli 2021 tersebut. Kemudian dari data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Pacitan sebanyak 159 pasien yang telah dinyatakan sembuh dan terdapat penambahan jumlah pasien yang meninggal akibat terpapar virus covid 19 ini sebanyak 3 orang. Saat ini, kasus yang aktif di Kabupaten Pacitan berada pada angka 331. Dengan demikian, jumlah total pasien yang terpapar covid 19 sejak pertama kali hingga Selasa 20 Juli 2021 dikonfirmasi sebanyak 4.610 orang, dengan total kesembuhan 4.171, dan total pasien yang meninggal sejumlah 108 orang.

Pacitan merupakan daerah yang terkenal akan sektor pariwisata, hal tersebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus covid 19 di Kabupaten Pacitan. Para pendatang yang berkunjung ke Pacitan menambah panjang daftar kasus covid 19 ini. Presentase kesembuhan covid 19 menurun sebanyak 85% akibat dari situasi ini. Tidak hanya presentase kesembuhan yang

menurun, situasi ini juga memupus harapan seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan untuk dapat mewujudkan wilayah Pacitan menjadi zona hijau. Beberapa kasus baru muncul dari warga Pacitan di beberapa daerah karena tertular oleh saudaranya dari luar kota yang sempat dinyatakan positif. Dan daerah tersebut memiliki riwayat perjalanan zona hitam.

Pemerintah Kabupaten Pacitan membuat beberapa kebijakan untuk mengatasi persebaran covid 19 dan untuk menangani meningkatnya status covid 19 dengan menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Kebijakan ini dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang-orang dan kelompok dengan kelompok, hal ini sangat diharapkan dapat membantu mengurangi persebaran covid 19 di Kabupaten Pacitan. Wisatawan yang ingin berkunjung ke Pacitan, Jawa Timur pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) wajib menyertakan bukti hasil rapid test antibodi atau rapid test antigen atau swab PCR jika akan menginap di akomodasi kabupaten tersebut. Hal tersebut tertera dalam Surat Edaran (SE) Bupati Pacitan Nomor 443/586/408.21/2020 tentang Peningkatan Disiplin Pelaksanaan Protokol Kesehatan Mengantisipasi Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Pacitan. Namun karena angka positif covid 19 terus meningkat pada awal tahun 2021 seluruh tempat wisata di Kabupaten Pacitan ditutup selama PPKM berlangsung, hal ini dilakukan karena wisata di Pacitan selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan.

Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menangani penanganan covid 19 pasti membutuhkan kerja keras dan kerja sama baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pacitan itu sendiri. Masyarakat diharapkan mampu mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk menekan angka persebaran covid 19. Dalam membuat kebijakan dan berbagai upaya penanganan covid 19 pemerintah kabupaten Pacitan harus membuat kebijakan yang cepat dan tepat dengan memanfaatkan TIK sesuai perkembangan zaman pada layanan publik secara efektif dan efisien. Hal tersebut merupakan tujuan dari terwujudnya Smart Government dengan pemerintahan yang agile dalam upaya penanganan covid -19 di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti serta membahas mengenai “Smart Government Dalam Model Agile Government di Kabupaten Pacitan” berdasarkan studi kasus penanganan covid 19.

2.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut, berdasarkan definisi dan interpretasi yang diberikan dalam konteks di atas :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menerapkan Smart Government untuk mengatasi pandemi covid-19?
2. Bagaimana hasil Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mengatasi pandemi covid 19 menurut perspektif Agile Government?

2.3 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan diatas, maka sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dapat memahami bagaimana pemerintah kabupaten pacitan dalam mengatasi pandemi covid 19 dengan menerapkan smart government dengan model agile government.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hasil Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menangani pandemi covid 19 menurut pendekatan agile government.

2.4 Manfaat Penelitian

2.4.1 Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini secara teoritis dinantikan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pembaca untuk memahami informasi lebih terkait penanganan covid 19 menurut smart government dengan model agile government.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif dari berbagai informasi berupa cepat tanggapnya dalam penelitian ini.

2.4.2 Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Berdasarkan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan antusias tersendiri dari berbagai pihak dan secara khusus dapat memberikan saran dan juga kritik terhadap penelitian smart government dalam model agile government dalam penanganan covid 19 di Kabupaten Pacitan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintahan khususnya pemerintahan Kabupaten Pacitan dalam menangani pandemi covid 19 melalui smart government agar dapat mewujudkan model agile government.

2.5 TINJAUAN PUSTAKA

2.5.1 Smart Government

Smart government merupakan sebuah pembahasan yang perlu di teliti. Untuk melihat dan memahami terkait pembahasan pelaksanaan smart government maka gambar dibawah ini memiliki tujuan untuk memberikan pemetaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan memberikan pemahaman lebih lanjut terkait smart government.

Gambar 1.1 Visualisasi Jaringan Penelitian Terdahulu Terkait Smart Government

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi VOSviewer

Pada gambar 2.1 diatas memberikan pemetaan terhadap jaringan penelitian-penelitian terdahulu terkait smart government dimana beberapa item jaringan diatas ditentukan dengan melihat perbedaan default warna. Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan empat warna yang berbeda. Pertama, warna ungu dengan item kata “emergent technology” berada para tahun 2014 hingga 2016. Kemudian, default warna biru memiliki item kata “smart government, outcome, service, local goverment” yang berada pada tahun 2016 hingga 2018. Selanjutnya, default warna hijau dengan item “website, framework, process, ” berada pada tahun 2020. Default warna kuning memiliki items kata “ civic tech” berada pada tahun 2020 sampai 2021.

Default warna ungu diatas memiliki dominan kata dan dan node yang paling besar yaitu smart government yang merupakan pembahasan yang paling sering dijadikan penelitian. Dengan demikian kajian terkait Agile Government di masa “smart government” merupakan kajian yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam seiring dengan berkembangnya teknologi serta kajian dan analisisnya.

Smart Government merupakan suatu langkah atau konsep lanjutan dari electronic government (e-government) dengan cara memanfaatkan inovasi dan teknologi yang digunakan pemerintah untuk kinerja yang lebih baik. Tujuan dari electronic government saat itu memanfaatkan teknologi agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam beberapa waktu setelahnya penerapan e-government dapat dilihat dengan adanya pelayanan publik secara lebih cepat dan real time di beberapa instansi pemerintahan. Namun pelayanan dari electronic government ini sendiri bersifat individual yaitu berjalan secara terpisah-pisah untuk setiap instansi dan layanan. Hal itu merupakan kelemahan dari pengimplementasian electronic government.

Smart government merupakan sebuah pembaruan dari electronic government. Dengan dasaran e-government yang sudah lebih dulu ada, smart government memperbaruhinya dengan menerapkannya di pelayanan publik pemerintahan. Didalam smart government pelayanan publik dilakukan dengan cara terpusat, yang dimana pelayanan publik dilakukan dengan saling berkaitan satu sama lain. Secara umum, penerapan TIK yang digunakan oleh layanan publik pada bidang pemerintahan bisa digunakan secara efektif melalui smart government. Oleh sebab itu sistem yang ada pada smart government tersebut akan dapat menunjang dan memastikan layanan dapat di akses dengan baik.

Pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 25 pasal 1 ayat 1 Tahun 2009 adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai undang-undang untuk setiap warga Negara dan penduduk berupa barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif. Dengan kata lain, pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Lebih lanjut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan pada

sektor publik adalah seluruh kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan tertentu.

Pelayanan publik oleh birokrasi publik bertujuan untuk melayani keperluan masyarakat yang berkepentingan, berpedoman pada aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Patrianus Khristian Sumule, 2012). Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan, menyelenggarakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya dengan menciptakan kenyamanan dan ketertiban yang mengayomi dan menyejahterakan masyarakatnya. Rendahnya kualitas pelayanan publik akan berdampak pada makin rendahnya kepercayaan publik kepada penyelenggara pelayanan publik akan berdampak pada melemahnya dukungan warga negara kepada pemerintah.

Smart government dalam prosesnya mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah daerah dan kota untuk berinteraksi lebih baik dengan warganya, memanfaatkan semua data yang tersedia untuk memecahkan berbagai masalah penting dan tentunya untuk memberikan layanan publik yang lebih efektif dan efisien. Maka tidak heran apabila kemudian pelayanan publik banyak yang diintegrasikan menjadi satu pintu. Dengan kata lain smart government bekerja dengan cara terpusat. Secara umum, Gamatechno menawarkan tiga konsep dalam implementasi Smart Government yang mencakup seluruh kepentingan. Pertama adalah Government to Government (G2G), yakni penciptaan dan penggunaan berbagai aplikasi yang bertujuan untuk menunjang produktivitas dan operasional instansi pemerintahan. Kedua adalah Government to Business (G2B), aplikasi di bagian ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah dan perusahaan misalnya dalam hal perizinan maupun pajak. Ketiga adalah Government to Citizen (G2C). Inovasi digital di bagian ini akan mempermudah tugas pemerintah dalam menyediakan berbagai macam informasi penting bagi masyarakat.

Ketika semua elemen dalam Smart Government dapat terwujud dan berjalan dengan baik, maka tidak hanya pemerintah yang diuntungkan, namun juga publik umum. Misalnya tentang

pemangkasan proses birokrasi di Surabaya via sistem e-Kios. Proses yang biasanya sangat berbelit dan membutuhkan waktu lama menjadi lebih efisien. Hal tersebut dapat meningkatkan citra kinerja pemerintah di mata masyarakat. Di lain pihak, masyarakat pun dipuaskan karena urusannya bisa cepat ditangani dengan alur yang lebih sederhana. Smart Government juga dapat menghemat berbagai hal. Contohnya, apabila pengembangan Smart Government terus berjalan, maka produk yang dihasilkan akan mengarah ke bentuk digital. Sehingga bisa meminimalisir penggunaan kertas dan tinta.. Kemudian mengenai kemudahan penanganan berbagai aspirasi masyarakat yang selama ini kewalahan untuk ditampung oleh sistem manual. Selama ini masyarakat menyalurkan aspirasi dan pertanyaan lain melalui berbagai cara manual yang terpisah-pisah, seperti tertulis, SMS, maupun Telepon. Pengarsipannya tentu membutuhkan usaha lebih keras. Namun jika aplikasi aspirasi sudah berjalan dengan baik, maka tidak hanya memudahkan masyarakat dalam bersuara kepada pemerintah namun juga memudahkan dalam pengarsipannya. Sebab seluruh pesan akan bermuara pada satu kendali yang terpadu. Dampaknya, prioritas tanggapan terhadap aspirasi yang ada bisa menjadi lebih jelas.

Perlu digaris bawahi bahwa smart government itu sendiri bukanlah tahap kedua dari e-government, melainkan salah satu bentuk penerapan E-government di lingkup pemerintahan, dalam rangka menyediakan informasi dan layanan pemerintah. (El-Kiki, 2005). E-Government memungkinkan masyarakat mendapat akses lebih luas ke berbagai informasi pemerintah, sebab penggunaan teknologi informatika yang inovatif dan berbasis web dapat menjangkau lebih banyak orang secara real time. Hal ini sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas layanan serta menciptakan institusi pemerintahan yang demokratis. (Fang, 2002; Aldholay, Isaac, Abdullah, & Ramayah, 2018; Mutahar et al., 2018)

2.2 Agile Government

Agile Government atau pemerintahan cergas menurut Wahyudi Kumorotomo, adalah manajemen pemerintahan yang tanggap, cepat, dan responsif melalui penciptaan struktur organisasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi dan antisipasi terhadap lingkungan disruptif di berbagai sektor (Kumorotomo, 2019).

Perbedaan antara Agile government dengan konsep pemerintahan konvensional antara lain, sistem manajemen publik dalam Agile government lebih lincah dan memiliki respon cepat, memiliki struktur organisasi yang mampu beradaptasi dengan tantangan dan peluang dalam Industri 4.0 (World Economic Forum dalam Kumorotomo, 2020). Agar Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi persaingan global, inovasi disruptif, perubahan yang cepat dan tak terduga, maka penerapan Agile government sangat diperlukan (Kumorotomo,2020)

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Terkait Smart Government dalam Agile Government

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
(Rahmadanita et al., 2019)	Implementasi kebijakan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di kota bandung	<p>1. Implementasi kebijakan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung secara umum memberikan dampak yang positif bagi target groups (kelompok sasaran). 2. Context of implementation (konteks implementasi) menunjukkan kondisi yang tidak baik sementara Content of policy (isi kebijakan) menunjukkan kondisi yang baik.</p> <p>Faktor yang paling dominan dari <i>content of policy</i> adalah Walikota sebagai pengambil kebijakan, yang harus memiliki inovasi dan bisa memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung untuk memiliki minimal 1 (satu) aplikasi untuk 1 (satu) layanan publik. Sementara faktor yang utama dari <i>context of implementation</i> adalah faktor kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Intinya, pada penelitian ini faktor <i>content of policy</i> lebih berpengaruh terhadap outcome/dampak daripada faktor <i>context of implementation</i>.</p>
(Irfan et al., 2018)	Pelaksanaan smart government di Kabupaten Soppeng	<p>Pelaksanaan online service di Kabupaten Soppeng memanfaatkan teknologi informasi (IT) berupa call center, website, integrasi beberapa SKPD ke SCC.</p> <p>Pelaksanaan open government diantaranya: pengadaan 16 titik pantau CCTV yang terhubung di SCC dan pengadaan jaringan ke BPKD untuk pemantauan absensi pegawai, pengintegrasian dengan beberapa SKPD pelayanan utama dan ruang publik, serta pengadaan jaringan dan pengintegrasian seluruh Kecamatan di Kabupaten Soppeng. Pengelolaan data dan informasi oleh SKPD, dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana sistem e-government Pemerintah Kabupaten Soppeng</p>
(Salem & Government, 2016)	Digital Transformation through Agile Governance – The Case of Smart Dubai	<p>1. Infrastruktur Smart city Dubai dimulai dengan transformasi digital, mulai dari e-government, smart government, smart city.</p> <p>2. Dubai pelayanan public sudah berbasis internet (electronic government), dan hamper seluruhnya sudah bisa diakses dengan telepon genggam serta pelayanan <i>realtime</i> selama 24 jam (smart</p>

		government)
(Kumorotomo, 2020)	Envisioning Agile Government: Learning from the Japanese Concept of Society 5.0 and the Challenge of Public Administration in Developing Countries	<p>1. Konsep agile government dan system administrasi public yang baru harus bisa mencegah dampak negatif dari inovasi disruptif, dengan tujuan melindungi masyarakat, dimana pelayanan public berbasis teknologi bisa membawa kemakmuran dan kebaikan bagi semua pihak.</p> <p>2. Konsep Jepang mengenai masyarakat 5.0 adalah system masyarakat yang dilengkapi dengan pelayanan public <i>super smart</i>, yakni dengan menggunakan robotic, IoT, dan AI</p>
(Chohan & Hu, 2020)	Success Factors Influencing Citizens' Adoption of IoT Service Orchestration for Public Value Creation in Smart Government	Pengaturan layanan memungkinkan pemerintah untuk memberikan <i>public value</i> dan juga kepercayaan public untuk membangun sikap positif warga menuju penggunaan IoT dalam layanan e-government. Model penelitian ini menjelaskan 71.8% kemudahan penggunaan, 59.7% kepercayaan masyarakat, 62.6% bermanfaat, 61.9% niat berperilaku, and 69.8% penciptaan public value. Hasil penelitian dan diskusi memberikan informasi berharga untuk membentuk public value dari layanan masyarakat berbasis IoT serta berperan dalam menyediakan referensi penelitian akademis. Selain itu penelitian ini membantu pembuat kebijakan untuk mendesain layanan publik berbasis IoT untuk menciptakan smart government, transparan, dan responsif untuk masyarakat.
(Kertati, n.d.)	Implementasi Smart Government Kota Surakarta	(1) pemerintah daerah telah menyediakan instrumen untuk keberhasilan infrastruktur smart city, sumber daya manusia dan peraturan. Tetapi dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas infrastruktur belum optimal seperti yang diharapkan; (2) Respons publik terhadap smart government tidak optimal, tetapi kelas menengah telah mampu untuk menggunakan dan berpartisipasi dalam smart government; (3) Ada 16 Perangkat Daerah yang telah menyediakan layanan publik berbasis TI dengan berbagai bentuk layanan; (4) Permintaan akan layanan berbasis TI telah meningkat tajam dari sebelumnya, dibuktikan oleh nilai SKM yang cukup baik dan (5) aksesibilitas publik ke layanan publik rendah karena kerentanan ekonomi, sosial, usia dan keterjangkauan harga.

(Tandungan & Parinussa, 2021)	Implementation of Dynamic Governance Concept Through Discretion Policy in Facing the National Emergency of Covid-19 in Indonesia	Penerapan Konsep Pemerintahan dinamis dalam menghadapi Darurat Nasional Covid 19 di Indonesia bisa dilakukan melalui aturan kebijakan oleh pemerintah. Aturan tersebut harus adaptif sehingga bisa eradaptasi pada perubahan kondisi yang sangat cepat di tengah penyebaran Covid 19.
(Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, 2021)	Dynamic Governance Capabilities in Regional Budget Policy Formulation to Create Agile Bureaucracy During Covid-19	<p>Hasil studi ini menemukan bahwa pemerintah daerah harus mampu melakukan using existing budgetary flexibility and exceptional spending procedures to fund first, sehingga program dan kegiatan yang akan dijalankan bisa lebih fleksibel.</p> <p>Lalu Tetap menjalankan program kagiatan lain yang sudah direncanakan, sehingga serapan anggaran akan tetap terus berjalan dan kehidupan ekonomi masyarakat bisa terus berkembang.</p>
(Karyono et al., 2020)	Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu	Dari segi hukum, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran (Covid-19) namun belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus Covid 19 di Indonesia. Jumlah pasien semakin bertambah, angka kematian pun semakin melaju, keberadaan regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya yang tegas namun santun di dalam masyarakat, peran aktif serta perhatian penuh dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Covid.
(Halim et al., 2021)	Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat	Implementasi agile governance pada pemerintah provinsi Jawa Barat dinilai belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih perlu adanya perbaikan pada Aplikasi Pikobar

Berdasarkan kajian diatas, telah dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan smart government dan agile government di berbagai tempat, serta penerapannya. Kesamaan terhadap penelitian terdahulu diatas adalah tentang pendalaman penelitian ini dari segi pandangan terhadap pemerintahan model agile yang berbasis teknologi informasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan menganalisis tentang penggunaan Smart Government dalam penerapan model birokrasi Agile government dalam penanganan pandemic Covid-19 di Kabupaten Pacitan.

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Smart Government

a. Smart Government dalam perspektif Agile Government

Smart government adalah penerapan serangkaian proses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) agar informasi lintas program dan sektor pemerintah berjalan lancar, dengan tujuan agar pemerintah menjadi lebih responsif dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi bagi masyarakat (Nento et al., 2017). Didalam smart government pemerintah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu hal penting smart government adalah birokrasi yang transparan dan terbuka serta tidak menyulitkan masyarakat.

Menurut Singler, et al. (2019) Smart Government memiliki potensi yang sangat besar bagi administrasi publik dan pemerintahan, terutama digunakan dalam:

1. Memfasilitasi kebijakan politik dan administrasi public dengan lebih baik
2. Membangun layanan publik yang lebih ramah pengguna, efektif dan efisien
3. Memungkinkan solusi inovatif dan kolaboratif dalam administrasi publik dan sektor lainnya
4. Membina keterlibatan warga

Adapun hal-hal yang diperlukan untuk membangun Smart Government antara lain:

1. Kepemimpinan dan strategi

Pemerintahan yang cerdas membutuhkan kepemimpinan dan strategi lintas departemen yang memprioritaskan dan berkomitmen pada tujuan dan investasi konkret – berdasarkan proses penyelarasan yang luas dan menantang.

2. Transformasi Organisasi

2.1 Tugas baru

Administrasi publik perlu melakukan tugas baru dan memberikan dorongan sementara untuk sentralisasi untuk mendorong transformasi dan menggabungkan sumber daya.

2.2 Kemampuan baru

Administrasi publik perlu mengembangkan kemampuan baru. Ini membutuhkan investasi khusus.

2.3. Prinsip-prinsip desain budaya yang baru dan desain layanan baru

Pemerintah yang cerdas membutuhkan prinsip-prinsip desain budaya dan layanan baru yang berfokus pada inovasi, kelincahan dan kewirausahaan, budaya berbasis data, kolaborasi, dan desain solusi digital.

2.4. Perekrutan SDM baru

Administrasi publik harus mengadaptasi kriteria perekrutan dan pelatihan serta model karir mereka untuk menanggapi persyaratan keterampilan baru yang muncul.

3. Wacana dan kesadaran publik

3.1 Komitmen politik dan wacana publik

Pemerintahan yang cerdas adalah misi jangka panjang yang memerlukan investasi awal, risiko tertentu, dan tingkat kebencian. Ini membutuhkan komitmen politik yang kuat dan wacana publik.

3.2 Kesadaran digital di masyarakat

Kesadaran digital merupakan prasyarat bagi pemerintahan yang cerdas, dan warga negara harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam solusi pemerintahan yang cerdas.

4. Kerjasama nasional

4.1 Tata kelola nasional yang jelas

Pemerintahan yang cerdas membutuhkan kolaborasi nasional dalam sistem politik. Oleh karena itu, peran dan mandat perlu didefinisikan dengan jelas untuk

menghindari redundansi dan investasi yang tidak selaras serta memastikan landasan hukum dan sistem teknis yang kompatibel.

4.2 Penyelarasan peraturan

Ketidakpastian tentang implikasi hukum dan perlindungan data menghambat pemerintahan yang cerdas. Upaya nasional untuk mengidentifikasi kebutuhan peraturan diperlukan.

4.3 Infrastruktur dan standar TI

Untuk meningkatkan kualitas, pihak berwenang perlu menjalin lebih banyak kolaborasi dalam pengadaan, desain, dan hosting serta lebih berfokus pada solusi yang dapat dilakukan, modular, dan dapat digunakan kembali. (Singer et al., 2019)

Indikator Smart Government antara lain :

b. Pelayanan Publik (Public Service)

- Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.

- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.
- c. Manajemen Birokrasi Yang Efisien (Bureaucracy).

Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (*fairness*), bertanggung-jawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*).

d. Efisiensi Kebijakan Publik (Public Policy)

- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

e. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya.

Agile Government adalah kemampuan pemerintah untuk cepat dan fleksibel membuat dan merespon perubahan kebutuhan dan tuntutan yang tidak terduga untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang semakin berubah (Mergel et al., 2018). Gagasan agile government ini merupakan suatu penerapan sistem manajemen yang responsif dan cepat ke dalam manajemen pemerintahan melalui penciptaan struktur organisasi adaptif, pemanfaatan teknologi informasi dan antisipasi terhadap lingkungan disruptif di berbagai sektor. Indikator dalam Agile Government :

- a. Responsivitas : Kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Pemerintah harus tanggap dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam menangani covid-19.
- b. Adaptasi strategis : pemerintah harus beradaptasi dengan cepat dalam mengatasi berbagai perubahan yang berbeda-beda.
- c. Efektif dan Efisien : pemerintah mampu membuat kebijakan dengan cepat dan tepat sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Memiliki manajemen antisipasi permasalahan masa depan : pemerintah dapat memahami berbagai perubahan sehingga dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi.

Menurut Luna (2015) terdapat enam prinsip dalam *agile governance* meliputi pemerintahan yang cukup bagus, berorientasi bisnis, berfokus pada manusia, solusi cepat, pendekatan sistemik dan adaptif, desain sederhana dan berkelanjutan. Sehingga *agile governance* dapat menyediakan solusi yang cepat, tepat, namun juga berkelanjutan. (Apriliyanti et al., 2021)

Smart government dalam agile government adalah kemampuan pemerintah untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki serta dapat meminimalisir kendala atau masalah yang akan terjadi dengan memanfaatkan *Information and Communication Technology* (ICT) yang di implementasikan pada layanan publik secara efektif dan efisien.

2.1.2 Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan pelayanan bagi masyarakat atas jasa, barang dan/atau pelayanan administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan public dan dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan publik memiliki tiga unsur utama; organisasi penyelenggara pelayanan publik, masyarakat dan/atau organisasi yang mempunyai kepentingan dalam penerimaan layanan (pelanggan) (LAN, 2016).

Dari kajian pustaka di atas, dapat dikatakan bahwa Smart Government dalam Agile Government dalam penanganan Covid-19 merupakan penerapan suatu sistem manajemen layanan masyarakat berbasis teknologi informasi yang efisien, real time,

terpusat, dalam mendukung pemerintahan yang lincah, responsive, dan adaptif dalam penanganan pandemi Covid-19.

2.2 Definisi Konseptual

2.2.1 Smart Government

Smart government adalah pemerintah cergas dan merupakan sebuah konsep lanjutan dari electronic government, smart government dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi serta terobosan baru yang digunakan pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerja.

Agile Governance adalah pemerintah yang dapat merespon perubahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat dengan mengimplementasikan TIK.

2.2.2 Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah suatu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

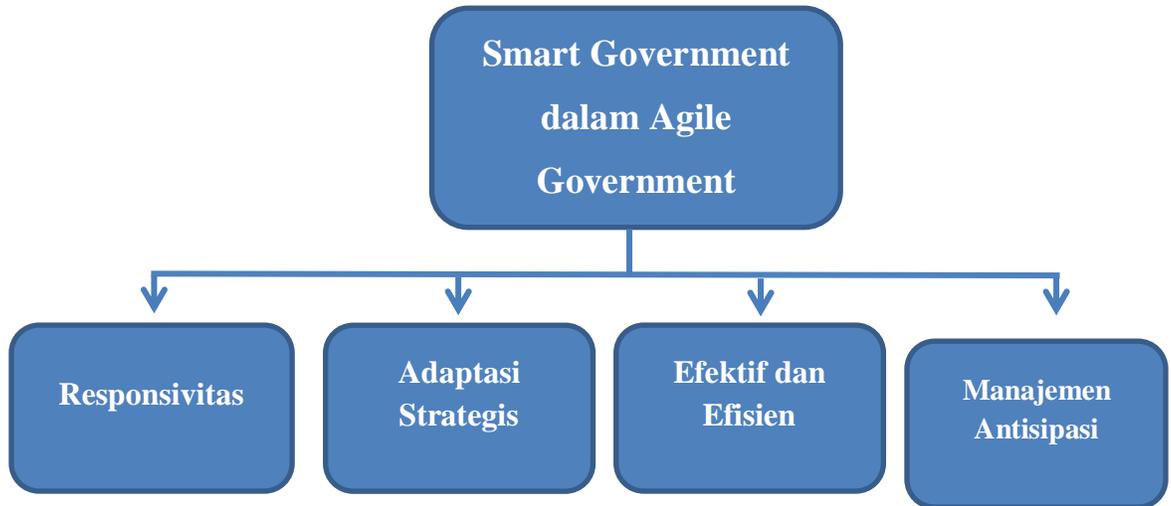
○ **Definisi Operasional**

Tabel 1.2 Definisi Operasional

VARIABEL	INDIKATOR
<p>Smart Government dalam Perspektif Agile Government</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsivitas : Kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Pemerintah harus tanggap dalam memberikan pelayanan publik termasuk pemberian pelayanan pendidikan untuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Bentuk dari layanan tersebut adalah terselenggaranya pendidikan yang menyeluruh. • Adaptasi strategis: pemerintah harus beradaptasi dengan cepat dalam mengatasi berbagai perubahan yang berbeda-beda. • Efektif dan Efisien : pemerintah mampu membuat kebijakan dengan cepat dan tepat sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. • Memiliki manajemen antisipasi permasalahan masa depan pemerintah dapat memahami berbagai perubahan sehingga dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi.

2.2 Kerangka Pikiran

Gambar 1.2 Kerangka Pikiran dalam Penelitian



○ METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Mengenai metode penelitian kualitatif, Rukin mendefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih, menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Metode kualitatif juga dapat berguna untuk memperoleh data spesifik untuk meningkatkan validitas instrumen survei beserta kuesioner yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, atau untuk menguraikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang muncul dari studi klinis/epidemiologi (Fossey et al., 2002). Jenis penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dengan menganalisis tentang smart government dalam model agile government yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan berdasarkan studi kasus penanganan covid-19.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan di Kabupaten Pacitan. Lokasi tersebut ditetapkan karena tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Smart Government dengan menggunakan model Agile Government di Kabupaten Pacitan dalam menangani kasus covid-19. Dinas Kesehatan merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menangani permasalahan covid-19 di Kabupaten Pacitan.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan (Purhanta, 2010). Data primer tersebut di kumpulkan oleh peneliti untuk dapat menjawab pertanyaan seputar penelitian. Pengumpulan data primer adalah bagian internal dari proses penelitian dan sering kali di butuhkan untuk pengambilan keputusan. Data primer diyakini lebih akurat, karena data disajikan dengan rinci.

Data primer pada penelitian Smart Government dalam Model Agile Government di Kabupaten Pacitan berdasarkan studi kasus Penanganan covid19 ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, wawancara dilakukan guna memperoleh data utama untuk penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diambil dari Smart Government dalam Model Agile Government di Kabupaten Pacitan. Berdasarkan studi kasus Penanganan covid19 ini berasal dari data statistik kasus covid-19 yang positif dan meninggal, data penerima bantuan sosial covid-19, jurnal, website Kemenkes, dan tingkat keterisian tempat tidur atau *Bed Occupancy Rate* (BOR).

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik Wawancara serta dokumentasi terkait Smart Government dalam Model Agile Government di Kabupaten Pacitan dengan studi kasus Penanganan Covid19 dengan menggunakan *nodes* dan *case* pada software Nvivo 12 Plus.

a. Wawancara

Pada penelitian Smart Government dalam Model Agile Government di Kabupaten Pacitan berdasarkan studi kasus penanganan covid19 menggunakan teknik wawancara yang akan dilakukan peneliti.

Tabel 1.2 Daftar Narasumber Yang Akan Diwawancarai Oleh Peneliti

Informan	Nama Pejabat Pemerintahan	Jabatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan		Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

	Drg. Nur Farida	
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Aris Istianah, S.KM	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Dinas Sosial Kabupaten Pacitan	 <p>Sugino</p>	Kepala Seksi Penyelenggaraan Sosial Korban Bencana Alam
Dinas Sosial Kabupaten Pacitan	 <p>Nurbambang Susiatio S.E</p>	Kepala Seksi Penyelenggaraan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial
RSUD Kabupaten Pacitan	 <p>Dr. Titis Dwi Tanti, Sp.PD</p>	Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data diperoleh dengan cara melakukan wawancara, dokumentasi, observasi serta menggunakan bantuan fitur Ncapture pada aplikasi Nvivo 12 Plus. Sebelum digunakan data akan di proses lebih dulu oleh peneliti. Adapun pada hal ini untuk menganalisis data dilakukan melalui perangkat lunak pengolah data yang merupakan salah satu alternatif cara untuk mengolah data penelitian. Salah satu program komputer yang dapat digunakan yaitu dengan aplikasi Nvivo terbaru versi 12 (O'neill et al., 2018).

Menurut (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, 2020) dalam menganalisis data terdapat 4 langkah yaitu pengumpulan dan pengolahan data, seleksi data, analisis antar-variabel dan varifikasi data, serta yang terakhir adalah penafsiran dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan dan pengolahan data

Seluruh data yang telah diperoleh dari proses wawancara, dokumentasi, observasi serta data yang diperoleh dengan menggunakan fitur Ncapture akan dikelola sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah itu peneliti akan menyalin hasil wawancara berupa rekaman suara menjadi teks yang selanjutnya data tersebut akan dipilih sesuai dengan indikator yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Seleksi data

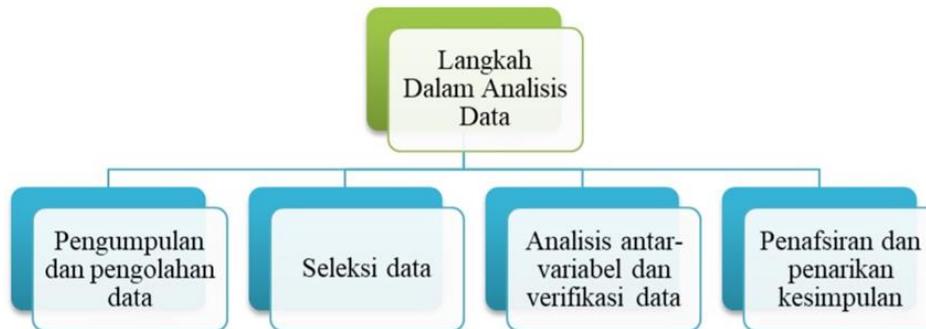
Di tahap ini seluruh data yang telah diperoleh akan disusun sesuai dengan kategori, kemudian data tersebut akan di teliti kembali, data yang telah diteliti adalah data yang sesuai dan berguna untuk dapat digunakan dalam proses menganalisis data dalam penelitian ini.

a. Analisis antar variabel dan verifikasi data

Setelah data diseleksi data tersebut akan dihubungkan antara satu variabel atau indikator dengan variabel atau indikator lainnya.

b. Penafsiran dan penarikan kesimpulan

Segala data yang telah diproses oleh peneliti selanjutnya akan di tafsirkan guna untuk menjawab rumusan masalah diatas. Hasil dari tafsiran tersebut kemudian menjadi acuan bagi peneliti untuk dapat membuat kesimpulan dari rangkaian penelitian secara keseluruhan.



Gambar 1.3 Empat langkah dalam menganalisis data

Sumber : (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, 2020)

5. Alat Bantu Analisis Data Penelitian

Pada penelitian menggunakan bantuan dari aplikasi software yaitu Nvivo 12 Plus dan Vosviewer sebagai analisis data kualitatif. Nvivo adalah software yang membantu peneliti kualitatif dan mixed-methods pada saat menganalisa data dan juga sejak awal penelitian dilakukan. Nvivo adalah salah satu contoh QDAS (Qualitative Data Analysis Software)(Maya & Yohanna, 2018). Penelitian ini dibantu menggunakan alat Nvivo untuk dapat menganalisis hasil dari teks wawancara, berita, yang berhubungan dengan penelitian yaitu Smart Government dalam Model Agile Government di Kabupaten Pacitan berdasarkan studi kasus Penanganan covid-19. Adapun menu yang dijadikan sebagai alat untuk mengolah data adalah :

b. Crosstab-Query

Crosstab query bertujuan untuk memeriksa penyebaran pengkodean di seluruh kasus ataupun pada kasus tertentu. Selain itu crosstab query dapat menganalisa seberapa sering responden/informan saat wawancara mengacu pada topik atau masalah tertentu.

c. Word Frequencies

Dalam hal ini adalah hal yang paling umum digunakan untuk menganalisis kata. Caranya adalah dengan melihat jumlah kata yang tertera pada hasil sumber penelitian, tujuannya adalah untuk dapat mengetahui konsep yang sering muncul, contohnya peneliti mencari kata yang sering digunakan dalam melakukan survei data ataupun untuk melihat seberapa sering responden atau informan mengucap kata-kata, sehingga peneliti dapat memeriksa secara individu atau tidak sedang dalam wawancara.

d. Cluster Analysis

Teknik ini dapat digunakan untuk menginvestigasi data yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan pola dalam project penelitian. Sumber data atau node yang memiliki kata yang mirip akan dikelompokkan.

a. Network Visualitation

Dalam network visualitation, setiap unit diwakilkan oleh label secara default dengan lingkaran. Ukuran dari lingkaran dan label suatu unit ditentukan oleh berat barang. Semakin tinggi berat suatu unit tersebut maka akan semakin besar lingkaran dan label barang. Tautan diwakili oleh garis antar unit.

b. Overlay Visualitation

Visualisasi dari overlay visualitation ini serupa dengan visualisasi jaringan kecuali unit tersebut berwarna berbeda. Terdapat dua cara dimana unit tersebut dapat di warnai dalam visualisasi yang bertumpukkan. Warna unit akan ditentukan oleh skor unit apabila unit memiliki skor, dimana secara default warna berada di warna biru (skor terendah) sampai hijau ke kuning (skor tinggi). Di sisi lain, jika unit memiliki definisi pengguna warna (ditentukan menggunakan kolom merah, hijau, dan biru dalam file peta VOSviewer).

c. Density Visualitation

Terdapat dua bentuk density visualitation. Seperti dalam visualisasi jaringan dan visualisasi overlay, kepadatan unit diwakili oleh labelnya dalam bentuk yang sama. Pada setiap titik dalam visualisasi kepadatan unit memiliki warna yang menunjukkan kepadatan unit pada saat titik itu.

Secara default, warna berada diantara biru ke hijau ke kuning. Semakin besar angka unit di sekitar titik serta semakin tinggi bobotnya unit tetangga, maka akan semakin dekat ke warna titik kuning.

Gambar 1.4 Teknik Analisis Data Penelitian

